

SISTEM POLITIK INDONESIA

Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Ilmu Politik, Budaya Politik, Partisipasi Politik, Politik Pembangunan, Kesadaran Masyarakat dalam Berpolitik, Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Sistem Politik, Landasan Hukum Sistem Politik, Reformasi Birokrasi, Stabilitas Politik, Peta Kekuatan Politik, Infrastruktur Politik, Fungsi Legislatif dan Eksekutif, Perkembangan Partai Politik di Indonesia.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



SISTEM POLITIK INDONESIA



SISTEM POLITIK INDONESIA

Ade Putra Ode Amane, Yoga Mahendra, Muhammad Yusuf, Siti Inayatul Faizah,
Andi Yusuf Katili, Muhamad Abas, Hasanudin Kasim, Yusuf Budi Prasetya Santosa,
Dinar Alqadri, Indah Wahyu Maesarini, Vina Karina Putri, Fatkhuri,
Opan Ahmad Solihin, Ivan Elisabeth Purba, Hasruddin Nur



SISTEM POLITIK
Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- I. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- II. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- III. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- IV. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SISTEM POLITIK

Indonesia

- Ade Putra Ode Amane
- Yoga Mahendra
- Muhammad Yusuf
- Siti Inayatul Faizah
- Andi Yusuf Katili
- Muhamad Abas
- Hasanudin Kasim
- Yusuf Budi Prasetya Santosa
- Dinar Alqadri
- Indah Wahyu Maesarini
- Vina Karina Putri
- Fatkhuri
- Opan Ahmad Solihin
- Ivan Elisabeth Purba
- Hasruddin Nur



SISTEM POLITIK INDONESIA

Penulis:

**Ade Putra Ode Amane | Yoga Mahendra
Muhammad Yusuf | Siti Inayatul Faizah
Andi Yusuf Katili | Muhamad Abas
Hasanudin Kasim | Yusuf Budi Prasetya Santosa
Dinar Alqadri | Indah Wahyu Maesarini
Vina Karina Putri | Fatkhuri | Opan Ahmad Solihin
Ivan Elisabeth Purba | Hasruddin Nur**

Editor Naskah

Andi Asari, M.A.

Desainer: **Tim Mafy**

Sumber Gambar Cover: **www.freepik.com**

Ukuran:

vi, 249 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-8575-41-1

Cetakan Pertama: **Februari 2024**

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2024

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul **Sistem Politik Indonesia**. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Ilmu Politik, Budaya Politik, Partisipasi Politik, Politik Pembangunan, Kesadaran Masyarakat dalam Berpolitik, Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Sistem Politik, Landasan Hukum Sistem Politik, Reformasi Birokrasi, Stabilitas Politik, Peta Kekuatan Politik, Infrastruktur Politik, Fungsi Legislatif dan Eksekutif, Perkembangan Partai Politik di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 31 Januari 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Bab 01	
Konsep Dasar Ilmu Politik	1
A. Pendahuluan	1
B. Kebijakan Publik	4
Bab 02	
Budaya Politik	17
A. Pendahuluan	17
B. Definisi Budaya Politik	19
C. Karakteristik Budaya Politik	20
D. Jenis-Jenis Budaya Politik	22
E. Perkembangan Budaya Politik	23
F. Pengaruh Budaya Politik	25
Bab 03	
Partisipasi Politik	29
A. Pendahuluan	29
B. Memahami Partipasi Politik	31
C. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	34
D. Intensitas Partisipasi Politik	37
E. Partipasi Politik Dunia Maya	40
Bab 04	
Politik Pembangunan	45
A. Konsep Dasar Pembangunan	45
B. Hubungan antara Politik dan Pembangunan	46

C. Teori-teori Pembangunan	48
D. Aktor Pembangunan Politik	56
E. Kebijakan Pembangunan Politik	57
Bab 05	
Kesadaran Masyarakat dalam Berpolitik	61
A. Pendahuluan	61
B. Budaya Politik Indonesia	63
C. Sistem Politik Indonesia	65
D. Kapabilitas Sistem Politik	67
E. Partai Politik	68
F. Partisipasi Politik	70
G. Perkembangan Partisipasi Politik Di Indonesia	72
Bab 06	
Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi	83
A. Pendahuluan	83
B. Teori Kesejahteraan dan Korupsi	86
C. Definisi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat serta Korupsi	91
D. Peraturan Terkait Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi	100
E. Aspek, Indikator dan Hambatan Kesejahteraan	103
F. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi	105
Bab 07	
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	111
A. Pendahuluan	111
B. Partisipasi Masyarakat	113
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Indonesia	118

Bab 08	
Sistem Politik	123
A. Pendahuluan	123
B. Konsep Sistem Politik	126
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Politik	128
D. Jenis-jenis Sistem Politik	130
Bab 09	
Landasan Hukum Sistem Politik	139
A. Sistem Politik	139
B. Landasan Hukum Sistem Politik	142
Bab 10	
Reformasi Birokrasi	147
A. Pendahuluan	147
B. Reformasi Birokrasi dalam Konsepsi Organisasi dan Pemerintahan	148
C. Reformasi Birokrasi di Era Digitalisasi	152
D. Penutup	155
Bab 11	
Stabilitas Politik	157
A. Pengertian Stabilitas Politik	157
B. Stabilitas Politik di Indonesia	159
C. Stabilitas Politik di Indonesia Era Orde Lama sampai Pasca Reformasi	160
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stabilitas Politik	165
E. Strategi dan Kebijakan untuk Mempertahankan Stabilitas Politik	167
Bab 12	
Peta Kekuatan Politik	173
A. Pendahuluan	173
B. Teori Kekuasaan (<i>power</i>)	175

C. Dinamika Kekuatan Politik di Indonesia di Era Reformasi	178
Bab 13	
Infrastruktur Politik	193
A. Infrastruktur Politik di Indonesia	193
B. Sistem Demokrasi di Indonesia	195
C. Lembaga Pemerintahan	200
D. Hubungan Internasional dalam Infrastruktur Politik di Indonesia	204
Bab 14	
Fungsi Legislatif dan Eksekutif	207
A. Pendahuluan	207
B. Fungsi Legislatif	209
C. Fungsi Eksekutif	212
D. Dinamika Fungsi Legislatif dan Eksekutif	213
E. Dampak Fungsi Legislatif dan Eksekutif Terhadap Kebijakan dan Pengelolaan Negara	215
Bab 15	
Perkembangan Partai Politik Di Indonesia	219
A. Partai Politik	219
B. Karakter Partai Politik di Indonesia	221
C. Peran dan Fungsi dari Partai Politik	223
PROFIL PENULIS	227



Bab 01

Konsep Dasar Ilmu Politik

Ade Putra Ode Amane

A. Pendahuluan

Ilmu Politik adalah disiplin ilmu sosial yang mempelajari proses, struktur, dan aktivitas yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Secara khusus, ilmu politik menyelidiki distribusi kekuasaan, hubungan antar individu dan kelompok, serta institusi yang membentuk pemerintahan dan sistem politik. Tujuan utama ilmu politik adalah memahami fenomena politik, merumuskan teori-teori yang menjelaskan gejala tersebut, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara pengelolaan kehidupan politik.

Lingkup Ilmu Politik

Adapun ruang lingkup ilmu politik adalah sebagai berikut: (Ilham *et al.*, 2023); (Mustanir, Ibrahim, *et al.*, 2023); (Amane, Zaman, *et al.*, 2023); (Luturmas *et al.*, 2023)

- Negara dan Pemerintahan. Mempelajari berbagai bentuk pemerintahan, struktur negara, dan dinamika kekuasaan di tingkat nasional.
- Kekuasaan dan Politik. Analisis kekuasaan dalam konteks sosial dan politik, termasuk bagaimana kekuasaan didistribusikan dan digunakan.
- Teori Politik. Pengembangan dan penerapan teori-teori untuk memahami berbagai fenomena politik, seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, dan teori-teori kontemporer.
- Hubungan Internasional. Memahami dinamika antarnegara, diplomasi, konflik internasional, dan organisasi internasional.
- Partisipasi Politik. Mempelajari berbagai bentuk partisipasi politik, seperti pemilu, gerakan sosial, dan aktivisme politik.
- Kebijakan Publik. Analisis pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan pada masyarakat.
- Sistem Politik Perbandingan. Membandingkan sistem politik dari berbagai negara untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam organisasi politik.
- Etika Politik. Mempertimbangkan aspek-aspek etis dalam pengambilan keputusan politik dan perilaku politik.
- Metode Penelitian Politik. Menyediakan kerangka kerja dan alat untuk melakukan penelitian ilmu politik, termasuk metode kualitatif dan kuantitatif.
- Isu-Isu Kontemporer. Mempelajari isu-isu politik yang sedang berlangsung, seperti perubahan iklim, globalisasi, dan konflik regional.
- Penerapan Ilmu Politik. Menerapkan konsep-konsep ilmu politik dalam konteks praktis, seperti peran ilmu politik dalam pembangunan masyarakat dan analisis kebijakan.

- **Aktivisme Politik.** Memahami peran aktivisme politik dalam mengubah kebijakan dan masyarakat.

Lingkup ilmu politik sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan politik, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global. Ilmu politik bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika politik dan memberikan kontribusi untuk perbaikan dan pemahaman lebih baik tentang tata kelola politik.

Objek Kajian Ilmu Politik

Objek kajian ilmu politik mencakup berbagai aspek kehidupan politik dan institusi yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa objek kajian utama dalam ilmu politik: (Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.*, 2022); (Ramadhani *et al.*, 2022); (Amane, Razak, *et al.*, 2023); (Mustanir, Sutiyani, *et al.*, 2023); (Fadli *et al.*, 2023); (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023)

- **Negara.** Struktur dan fungsi negara sebagai entitas politik yang memiliki pemerintahan, hukum, dan kekuasaan untuk mengatur masyarakat.
- **Pemerintahan.** Studi tentang lembaga-lembaga pemerintahan, proses pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan keputusan politik.
- **Kekuasaan.** Analisis distribusi kekuasaan di dalam masyarakat dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan atau disalurkan.
- **Sistem Politik.** Struktur dan fungsi dari sistem politik, termasuk hubungan antara berbagai lembaga dan aktor politik.
- **Partai Politik.** Organisasi politik yang bersaing untuk memenangkan dukungan publik dan memegang kekuasaan politik.
- **Pemilu dan Sistem Pemilihan.** Proses demokratis untuk memilih perwakilan politik dan sistem pemilihan yang digunakan dalam suatu negara.
- **Hubungan Internasional.** Studi tentang hubungan antarnegara, diplomasi, organisasi internasional, dan konflik internasional.

- Kebijakan Publik. Analisis kebijakan pemerintah, termasuk proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan dampaknya pada masyarakat.
- Partisipasi Politik. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, termasuk pemilu, demonstrasi, dan aktivitas politik lainnya.
- Konflik Politik. Studi tentang konflik politik, termasuk perang, pemberontakan, dan ketegangan politik antar-grup.
- Hak Asasi Manusia. Penelitian tentang perlindungan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks politik.
- Teori Politik. Pengembangan dan aplikasi teori-teori politik untuk memahami fenomena politik.
- Sistem Politik Perbandingan. Perbandingan sistem politik dari berbagai negara untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam organisasi politik.
- Media dan Politik. Hubungan antara media massa dan politik, termasuk bagaimana media memengaruhi opini publik dan proses politik.
- Sosiologi Politik. Analisis hubungan antara struktur sosial dan kehidupan politik, termasuk peran kelas sosial, ras, dan jenis kelamin dalam politik.

Objek kajian ilmu politik mencerminkan keragaman topik dan masalah yang melibatkan aspek-aspek politik dalam masyarakat. Dengan memahami objek kajian ini, ilmu politik dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kehidupan politik membentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

B. Kebijakan Publik

Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan

publik dapat melibatkan pengesahan undang-undang, peraturan, program-program pemerintah, dan keputusan lainnya yang mempengaruhi tata kelola dan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sering kali melibatkan alokasi sumber daya dan merumuskan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, (Bormasa *et al.*, 2023); (Alaslan *et al.*, 2023); (Hendrayady *et al.*, 2023); (Amane, Bagenda, *et al.*, 2023a).

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan positif pemerintah, tetapi juga kebijakan yang melibatkan penolakan atau pengurangan dalam suatu bidang tertentu. Definisi kebijakan publik dapat melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, tergantung pada konteks dan jenis kebijakan yang dibahas.

Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan banyak lagi. Selain itu, kebijakan publik dapat dibuat dan diimplementasikan di tingkat lokal, nasional, atau bahkan internasional, tergantung pada ruang lingkup dan dampaknya.

Dalam proses pembuatannya, kebijakan publik melibatkan analisis masalah, identifikasi solusi yang mungkin, pertimbangan dampak, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Implementasi kebijakan sering kali diikuti oleh evaluasi untuk mengevaluasi efektivitasnya dan, jika perlu, melakukan penyesuaian atau perubahan, (Amane *et al.*, 2023).

Dengan demikian, definisi kebijakan publik mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat.

Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik mencakup serangkaian langkah-langkah yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan dari

perumusan ide hingga implementasi dan evaluasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses kebijakan publik: (Guampe, Kundhani, *et al.*, 2023); (Luturmas *et al.*, 2023); (Amane, Bagenda, *et al.*, 2023b); (Zahari *et al.*, 2023); (Subagiyo *et al.*, 2023); (Sembiring *et al.*, 2023); (Hasan *et al.*, 2023)

- Perumusan Agenda. Tahap awal proses kebijakan adalah menetapkan agenda, yaitu mengidentifikasi masalah atau isu tertentu yang memerlukan perhatian dan tindakan. Agenda ini bisa muncul dari berbagai sumber, seperti tekanan masyarakat, masalah yang mendesak, atau janji kampanye.
- Analisis Kebutuhan dan Perumusan Masalah. Setelah agenda ditetapkan, dilakukan analisis kebutuhan dan perumusan masalah untuk memahami akar penyebab dan dampak dari isu yang diidentifikasi. Langkah ini melibatkan pengumpulan data, penelitian, dan konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan.
- Perumusan Kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah atau lembaga terkait merumuskan opsi kebijakan yang mungkin untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan penelitian mendalam, perbandingan dengan praktik internasional atau lokal lainnya, dan pembahasan dengan para ahli.
- Adopsi Kebijakan. Setelah opsi kebijakan dirumuskan, langkah berikutnya adalah adopsi kebijakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Proses ini melibatkan pembahasan, negosiasi, dan pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan atau legislator.
- Implementasi. Implementasi kebijakan melibatkan konversi rencana kebijakan menjadi tindakan nyata. Ini bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau sektor swasta, tergantung pada sifat kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai.
- Evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya dan apakah ada dampak

yang tidak diinginkan. Evaluasi melibatkan pengumpulan data, analisis, dan umpan balik dari pemangku kepentingan.

- Penyesuaian dan Revisi. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dapat disesuaikan atau direvisi untuk meningkatkan efektivitasnya. Proses ini dapat melibatkan perubahan dalam implementasi, anggaran, atau bahkan perubahan kebijakan secara keseluruhan.
- Pengakhiran. Jika kebijakan tidak lagi relevan atau tidak efektif, atau jika tujuan telah tercapai, kebijakan dapat diakhiri atau ditarik kembali. Pengakhiran kebijakan juga dapat terjadi jika ada perubahan dalam prioritas politik atau perubahan kondisi eksternal.

Proses kebijakan publik bersifat dinamis dan dapat terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk perubahan politik, tekanan masyarakat, dan kondisi ekonomi. Tahap-tahap tersebut tidak selalu linier dan dapat melibatkan iterasi atau siklus yang terus berulang seiring berjalannya waktu.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap kritis dalam siklus kebijakan publik di mana rencana dan keputusan yang diambil pada tahap perumusan dan adopsi diwujudkan menjadi tindakan konkret. Proses implementasi mencakup berbagai langkah yang melibatkan lembaga-lembaga, individu, dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam implementasi kebijakan: (Tachjan, 2006); (Taufiqurakhman, 2014); (Sahya Anggara, 2018); (Baharuddin *et al.*, 2023); (Hasan *et al.*, 2023)

- Rencana Implementasi. Pembuatan rencana implementasi yang rinci adalah langkah awal. Ini mencakup penetapan tujuan spesifik, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal waktu, dan strategi pelaksanaan.
- Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab. Menetapkan tanggung jawab kepada berbagai lembaga, kelompok, atau individu yang

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Ini termasuk definisi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

- **Koordinasi Antara Pihak-Pihak yang Terlibat.** Memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi, baik itu lembaga pemerintah, sektor swasta, atau organisasi non-pemerintah. Koordinasi yang baik diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi.
- **Sumber Daya dan Anggaran.** Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ini melibatkan alokasi anggaran, personel, infrastruktur, dan sumber daya lainnya sesuai dengan rencana implementasi.
- **Komunikasi.** Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam memastikan pemahaman yang baik tentang kebijakan di kalangan pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup informasi tentang tujuan kebijakan, peran masing-masing pihak, dan dampak yang diharapkan.
- **Pendidikan dan Pelatihan.** Melibatkan pelatihan dan pendidikan bagi mereka yang terlibat dalam implementasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
- **Pengawasan dan Pengendalian.** Menetapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memantau kemajuan implementasi, mengidentifikasi potensi masalah, dan memberikan perbaikan jika diperlukan.
- **Evaluasi Sementara.** Melakukan evaluasi sementara selama pelaksanaan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana dan, jika diperlukan, melakukan penyesuaian sepanjang jalan.
- **Penyesuaian dan Perubahan.** Membuka kemungkinan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan dalam implementasi jika terdapat hambatan atau masalah yang muncul selama proses.
- **Evaluasi Akhir.** Melakukan evaluasi akhir setelah implementasi selesai untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya

dan apakah ada perubahan yang diperlukan pada tahap berikutnya.

Implementasi kebijakan merupakan fase yang kompleks dan dapat melibatkan berbagai tantangan. Keberhasilan implementasi sering kali bergantung pada kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, alokasi sumber daya yang memadai, dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan kondisi atau masalah yang muncul selama pelaksanaan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak, keefektifan, dan efisiensi kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya, apakah ada dampak yang tidak diinginkan, dan bagaimana pelaksanaannya dapat ditingkatkan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses evaluasi kebijakan: (Salampessy, Suhariyanto, *et al.*, 2023); (Amane, Syaickhu, *et al.*, 2023)

- **Penetapan Kriteria Evaluasi.** Menetapkan kriteria atau standar untuk menilai kebijakan. Kriteria ini dapat mencakup aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, dan dampak sosial atau lingkungan.
- **Pengumpulan Data.** Mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan. Ini dapat melibatkan survei, wawancara, analisis statistik, dan sumber data lainnya sesuai dengan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.
- **Analisis Data.** Menganalisis data untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya.
- **Penilaian Dampak.** Menilai dampak kebijakan baik secara positif maupun negatif. Ini mencakup dampak langsung dan tidak langsung, serta dampak yang mungkin tidak diantisipasi pada awalnya.

- Efektivitas dan Efisiensi. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini dapat mencakup pertimbangan tentang alternatif kebijakan yang mungkin lebih efektif atau efisien.
- Analisis Kecukupan. Menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut memadai dalam mengatasi masalah atau isu yang dihadapi. Hal ini melibatkan evaluasi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuannya atau apakah perubahan atau penyesuaian diperlukan.
- Keadilan dan Kesetaraan. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut adil dan setara dalam dampaknya pada berbagai kelompok masyarakat. Ini melibatkan pertimbangan tentang distribusi manfaat dan beban kebijakan.
- Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan. Memperoleh umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh kebijakan. Pendapat dan pengalaman mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- Rekomendasi untuk Perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan kebijakan. Ini dapat mencakup perubahan dalam desain kebijakan, proses implementasi, atau perubahan pada tingkat regulasi.
- Pelaporan dan Komunikasi Hasil. Menyusun laporan evaluasi yang menyajikan temuan, analisis, dan rekomendasi secara jelas dan mudah dipahami. Komunikasi hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan adalah langkah penting untuk memastikan penggunaan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan.

Proses evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan setelah kebijakan diterapkan, tetapi juga dapat dilakukan secara berkala selama siklus kebijakan untuk memantau dan menyesuaikan implementasi sesuai kebutuhan. Evaluasi yang baik memberikan

dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan perbaikan dalam perumusan dan implementasi kebijakan di masa depan.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah proses penyelidikan, penelitian, dan evaluasi suatu kebijakan untuk memahami dampak, efektivitas, dan konsekuensinya. Tujuannya adalah menyediakan dasar pengetahuan yang mendalam untuk membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang informasional dan rasional. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses analisis kebijakan: (Salampessy, Supriyanto, *et al.*, 2023); (Guampe, Rosidah, *et al.*, 2023); (Mustanir, Yuyun Alfasius Tobondo, *et al.*, 2023); (Subagiyo *et al.*, 2023)

- **Identifikasi dan Perumusan Masalah.** Mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu diatasi dengan kebijakan. Perumusan masalah melibatkan analisis mendalam tentang akar penyebab dan dampak masalah tersebut.
- **Penentuan Tujuan Kebijakan.** Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk kebijakan. Tujuan ini harus terkait erat dengan perumusan masalah dan memberikan arah untuk penilaian keberhasilan kebijakan.
- **Pengumpulan Data.** Mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis. Data dapat mencakup informasi statistik, tinjauan literatur, wawancara, dan data kualitatif atau kuantitatif lainnya yang relevan.
- **Analisis Dampak.** Menganalisis dampak kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diinginkan. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik dari implementasi kebijakan.
- **Analisis Keberlanjutan.** Menilai keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Ini mencakup analisis tentang apakah kebijakan dapat mempertahankan dampak positifnya dan meminimalkan dampak negatif dalam jangka waktu yang lebih lama.

- Analisis Alternatif. Mempertimbangkan alternatif-alternatif kebijakan yang mungkin. Ini dapat mencakup evaluasi kebijakan yang berbeda atau skenario yang mungkin mencapai tujuan yang sama dengan cara yang lebih efisien atau efektif.
- Analisis Kebijakan Komparatif. Membandingkan kebijakan yang diusulkan dengan kebijakan serupa di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Hal ini dapat memberikan pandangan tentang praktik terbaik dan dampak yang mungkin diantisipasi.
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan. Menilai keberhasilan dan kegagalan kebijakan yang ada. Identifikasi elemen-elemen yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perumusan kebijakan baru.
- Analisis Keuangan dan Anggaran. Menganalisis implikasi keuangan dan anggaran dari kebijakan. Ini mencakup pertimbangan tentang sumber daya yang diperlukan untuk implementasi dan apakah sumber daya tersebut dapat dialokasikan dengan efisien.
- Analisis Risiko. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang terkait dengan implementasi kebijakan. Ini termasuk risiko politik, ekonomi, dan sosial yang mungkin mempengaruhi keberhasilan kebijakan.
- Pembuatan Model atau Simulasi. Penggunaan model atau simulasi untuk memprediksi dampak kebijakan di masa depan. Ini dapat membantu dalam merencanakan dan memproyeksikan konsekuensi kebijakan dalam jangka panjang.
- Penyusunan Laporan Analisis Kebijakan. Menyusun laporan yang merinci temuan dan hasil analisis kebijakan. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan dapat dipahami, dan mencakup rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan kebijakan.

Analisis kebijakan adalah alat yang sangat penting dalam mendukung proses perumusan kebijakan yang efektif dan

berkelanjutan. Hasil analisis yang baik dapat memberikan dasar yang kuat untuk pembuatan keputusan yang informasional dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. *et al.* (2023) *KEPEMIMPINAN*. Pertama. Edited by Adrias. Padang: CV. Gita Lentera.
- Amane, A. P. O., Bagenda, C., *et al.* (2023a) *ADMINISTRASI KEPEGAWALAN*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Amane, A. P. O., Bagenda, C., *et al.* (2023b) *ADMINISTRASI KEPEGAWALAN*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Amane, A. P. O., Zaman, W., *et al.* (2023) *BUKU AJAR DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by S. A. Laali. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., *et al.* (2023) *ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Syaickhu, A., *et al.* (2023) *MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK*. Pertama. Edited by A. Riwayati. Gowa-Makassar: CV. Ayrada Mandiri.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., *et al.* (2023) *Pembangunan Politik*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Amane, A. P. O. *et al.* (2023) *REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama, *NBER Working Papers*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Baharuddin *et al.* (2023) *KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, PROSES, DAN PENERAPANNYA)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Magelang: PT. ADIKARYA PRATAMA GLOBALINDO.

- Bormasa, M. F. *et al.* (2023) *Birokrasi Indonesia*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fadli, Z. *et al.* (2023) *Ilmu negara*. Pertama. Edited by D. P. Sar. Padang: Get Press Indonesia.
- Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.* (2022) *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)*. Pertama. Edited by N. S. Wahyuni. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., *et al.* (2023) *KEBIJAKAN PUBLIK (DARI SEJARAH, TEORI, PROSES, DAN PRAKTEKNYA)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Guampe, F. A., Rosidah, *et al.* (2023) *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (PENERAPAN DI ERA INOVASI DIGITALISASI)*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hasan, M. *et al.* (2023) *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hendrayady, A. *et al.* (2023) *Manajemen Pelayanan Publik*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Ilham, T. *et al.* (2023) *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. U. Athahirah. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Luturmas, Y. *et al.* (2023) *Sistem Administrasi Negara*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Get Press Indonesia.
- Mustanir, A., Yuyun Alfasius Tobondo, *et al.* (2023) *BIROKRASI INDONESIA*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Mustanir, A., Ibrahim, M. M., *et al.* (2023) *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Get Press Indonesia.

- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., *et al.* (2023) *Ilmu Politik*. Pertama. Edited by A. Asari. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ramadhani, M. M. *et al.* (2022) *Pengantar Ilmu Politik*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sahya Anggara (2018) *Pengantar Kebijakan Publik*. Kedua. Bandung: Pustaka Setia.
- Salampessy, M., Suhariyanto, D., *et al.* (2023) *KEBIJAKAN PUBLIK*. Pertama, *CV. Gita Lentera*. Pertama. Edited by Ukas. Padang.
- Salampessy, M., Supriyanto, D., *et al.* (2023) *KEBIJAKAN PUBLIK*. Pertama. Edited by Ukas. Padang: CV. Gita Lentera.
- Sembiring, L. D. *et al.* (2023) *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Subagiyo, A. *et al.* (2023) *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (Suatu Pengantar)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Magelang: PT. ADIKARYA PRATAMA GLOBALINDO.
- Tachjan, H. (2006) *Implementasi Kebijakan Publik*. Pertama. Edited by D. Mariana and C. Paskarina. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Taufiqurakhman (2014) *Kebijakan Publik*. Pertama. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Zahari, A. F. M. *et al.* (2023) *Reformasi Administrasi Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.



Bab 13

Infrastruktur Politik

Oleh Opan Ahmad Solihin

A. Infrastruktur Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan prinsip demokrasi. Pemilihan umum yang bersifat terbuka dan kompetitif menjadi elemen kunci dalam menjalankan sistem politik ini. Selain itu, prinsip otonomi daerah juga menjadi fitur penting untuk memberikan kekuatan dan tanggung jawab kepada tingkat pemerintahan yang lebih lokal. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Infrastruktur politik di Indonesia merupakan badan atau lembaga yang ada di dalam masyarakat, seperti contoh partai politik (parpol), organisasi masyarakat (ormas), media massa, tokoh politik, dan pranata politik lainnya. Dengan demikian, infrastruktur politik memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat kemudian diharapkan semua keputusan pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat. Infrastruktur Politik menurut para ahli dijelaskan sebagai berikut :

- Almond dan Coleman
Menurut *Almond* dan *Coleman*, infrastruktur politik adalah struktur politik masyarakat atau rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat (political infrastructures subsets, socio-political sphere).
- Sri Soemarni
Pakar dalam negeri Sri Soemantri mendefinisikan sistem politik sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan hubungan antara manusia yang ada dengan berbagai macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
- I Made Subawa
Pakar hukum dalam negeri lainnya yaitu I Made Subawa dalam buku yang berjudul “Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945” menjelaskan jika hak berserikat merupakan HAM yang diklasifikasikan sebagai hak politik dan menjadi dasar bagi terbentuknya pembentukan infrastruktur politik dalam negara. Kemudian infrastruktur politik dijelaskan sebagai lembaga atau organ di luar pemerintahan dan dibentuk oleh masyarakat, yang keberadaannya turut serta terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga negara.

Infrastruktur politik merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat (Wisnu Mahendra: 2020). Dalam ilmu politik, infrastruktur politik menjadi suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain. Kemudian membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu. Infrastruktur politik memiliki tujuan utama untuk menyalurkan

aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam proses bernegara, infrastruktur politik memiliki peran penting sebagai lembaga untuk memberikan berbagai masukan kepada penguasa.

Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik, dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan bentuk dan proses pemerintahan negara. Berdasarkan teori politik, infrastruktur politik mencakup 5 (lima) unsur yaitu partai politik (*political party*), kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), media komunikasi politik (*political communication media*), dan tokoh politik (*political figure*).

B. Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Definisi demokrasi menurut para ahli adalah :

- *Abraham Lincoln* mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- *Sidney Hook* mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- *Koentjoro Poerbopranoto* dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara.
- *Harris Soche* dalam Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia menerangkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, dan karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat, diri orang banyak; dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehubungan dengan perkembangannya, Dwi Sulisworo dkk. membagi demokrasi Indonesia ke dalam empat masa, yakni sebagai berikut :

- Masa pertama: Demokrasi Konstitusional (1945--1950). Di masa ini, peranan parlemen dan partai sangatlah menonjol.
- Masa kedua: Demokrasi Terpimpin (1959--1965). Mulainya masa ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden. Dalam praktiknya, masa ini berakhir dengan peristiwa G30S pada 30 September 1965.
- Masa ketiga: Demokrasi Pancasila (1965--1998). Secara garis besar, masa ini menggunakan landasan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- Masa keempat: Demokrasi Pascareformasi (1998--saat ini). Cenderung mengalami banyak perubahan. Partai politik baru bermunculan, pemilihan umum pun dilaksanakan secara langsung dan rutin.

Sistem demokrasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia menerapkan sistem demokrasi republik, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan diwakili oleh wakil-wakil yang dipilih secara langsung. Berikut adalah beberapa poin utama tentang sistem demokrasi di Indonesia:

- Presidensial: Indonesia memiliki sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan dapat menjabat maksimal dua periode.
- Pemilihan Umum (Pemilu): Pemilu diadakan secara berkala untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam satu paket.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): DPR adalah lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi

pemerintah. Anggota DPR dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum.

- Dewan Perwakilan Daerah (DPD): DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang bertugas membahas isu-isu daerah. Anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat di tingkat provinsi.
- Sistem Multi-Partai: Indonesia memiliki sistem multi-partai, yang berarti terdapat banyak partai politik yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu legislatif dan presiden di Indonesia menggunakan sistem proporsional.
- Prinsip Kepemimpinan dan Keterbukaan: Sistem demokrasi di Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip ini diamanatkan dalam UUD 1945.

Meskipun Indonesia telah berhasil menjalankan sistem demokrasi sejak reformasi pada tahun 1998, tetapi seperti di negara-negara lain, ada juga tantangan dan permasalahan yang terus dihadapi, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan tantangan dalam mengelola keragaman budaya dan agama. Proses demokrasi adalah suatu perjalanan yang terus berlanjut, dan perubahan dan perbaikan terus dikejar untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sistem Partai Politik di Indonesia

Sistem partai politik di Indonesia bersifat multi-partai, artinya ada banyak partai politik yang berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum. Konsep dari multi-partai adalah ada banyak partai politik yang aktif di Indonesia. Pemilu umum biasanya melibatkan lebih dari sepuluh partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Selain partai politik nasional, ada juga partai-partai lokal yang berfokus pada isu-isu daerah atau etnis tertentu. Pada tingkat daerah, terdapat partai-partai yang berkembang di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dengan platform dan tujuan yang lebih spesifik.

Sistem Pemilu Proporsional: Pemilu legislatif di Indonesia menggunakan sistem proporsional. Ini berarti bahwa kursi di DPR dan DPD didistribusikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing partai. Dengan demikian, partai-partai yang mendapatkan suara lebih tinggi akan mendapatkan lebih banyak kursi. Didalam sistem kepartaian di Indonesia banyak ditemukan berbagai macam koalisi dari partai. Dalam beberapa kasus, partai politik dapat membentuk koalisi untuk mengamankan mayoritas di DPR atau di tingkat daerah. Koalisi ini kemudian dapat membentuk pemerintahan dan memilih presiden.

Pemilihan presiden di Indonesia juga melibatkan partai-partai politik. Namun, untuk dapat mencalonkan presiden, partai atau koalisi partai harus memenuhi syarat tertentu, seperti memperoleh jumlah kursi tertentu di DPR atau dukungan sejumlah provinsi. Partai politik di Indonesia harus terus memperoleh dukungan dari masyarakat. Dukungan ini diperoleh melalui kampanye politik, program-partai yang jelas, dan kinerja anggota partai di DPR atau lembaga legislatif lainnya.

Partai politik di Indonesia juga tunduk pada regulasi dan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka harus mematuhi peraturan terkait pendanaan kampanye, kepemilikan partai, dan aturan-aturan lainnya. Sistem partai politik di Indonesia adalah bagian integral dari sistem demokrasi dan memainkan peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

Konstitusi Indonesia

Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur dasar-dasar negara, kedudukan pemerintahan, dan hak-hak rakyat di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun sebagai hasil perjuangan kemerdekaan Indonesia dan diundangkan pada tanggal

18 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan, terutama melalui Amandemen UUD 1945.

Sejak tahun 1999, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen. Proses amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan negara. Amandemen dilakukan melalui proses yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memerlukan persetujuan dari paling sedikit dua pertiga anggota DPR. UUD 1945 mengandung ketentuan-ketentuan pokok, termasuk hak asasi manusia, bentuk negara (republik), kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta berbagai hal yang mendasar terkait dengan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian UUD 1945 menetapkan prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki fungsi dan wewenang masing-masing untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Konstitusi Indonesia pun menjamin hak asasi manusia sebagai bagian integral dari norma-norma dasar. HAM termaktub dalam Bab XA UUD 1945 dan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Dalam proses berjalannya sebuah negara, Indonesia memiliki prinsip yang tertuang dalam konstitusi juga, prinsip ini dikenal Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945, mencerminkan keberagaman budaya, suku bangsa, dan agama di Indonesia.

Sampai pada tahap pembahasan pemilu, dalam UUD 1945 ditetapkan dasar untuk pelaksanaan pemilu secara demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi diatur dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum dan kebebasan berpendapat. Jika ditarik garis besarnya bahwa Konstitusi Indonesia adalah landasan hukum dan moral bagi pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Adapun perubahan atau amandemen yang dilakukan, hal tersebut sesuai

dengan mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 untuk menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan negara dan masyarakat.

C. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh *Montesque* bahwasanya kekuasaan didalam pemerintahan dibagi menjadi tiga yang dikenal dengan Trias Politica. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu entitas, sehingga sistem pemerintahan dapat berfungsi dengan seimbang. Berikut adalah penjelasan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif :

- **Eksekutif**

- Fungsi Utama: Pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penegakan hukum.
- Pimpinan: Biasanya dikepalai oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan seperti presiden atau perdana menteri.
- Contoh Lembaga:
Di sebagian besar negara, lembaga eksekutif mencakup kabinet menteri atau dewan menteri yang bertanggung jawab atas berbagai portofolio atau departemen pemerintahan.

- **Legislatif**

- Fungsi Utama: Pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah.
- Pimpinan: Biasanya terdapat parlemen atau majelis legislatif yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat atau diwakili oleh sejumlah wilayah tertentu.
- Contoh Lembaga:
Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senat, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di berbagai negara.

- **Yudikatif**

- Fungsi Utama: Penafsiran hukum dan penegakan keadilan.

- Pimpinan: Umumnya dikepalai oleh hakim tertinggi atau kepala pengadilan tertinggi.
- Contoh Lembaga:
Pengadilan Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan tingkat rendah yang memutuskan berbagai jenis kasus hukum.

Setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, dan sistem ini dikenal sebagai prinsip pembagian kekuasaan (checks and balances), yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap cabang memiliki kemandirian dan otonomi dalam melaksanakan tugasnya.

Media dan Komunikasi Politik

Media dan komunikasi politik merupakan bagian integral dari infrastruktur politik dalam suatu masyarakat. Infrastruktur politik mencakup berbagai elemen dan lembaga yang mendukung sistem politik suatu negara. Media dan komunikasi politik memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi politik, membentuk opini publik, dan memfasilitasi interaksi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan bagaimana media dan komunikasi politik merupakan bagian dari infrastruktur politik :

- **Menyampaikan Informasi Politik:** Media memberikan saluran untuk menyampaikan informasi politik kepada masyarakat. Berita, laporan, dan analisis politik disiarkan melalui berbagai platform media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media online.
- **Membentuk Opini Publik:** Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Pemberitaan yang objektif atau subjektif dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang isu-isu politik, kandidat, atau partai politik.
- **Kampanye Politik:** Media digunakan sebagai alat utama dalam kampanye politik. Calon politik menggunakan media untuk

menyampaikan pesan, mempromosikan kebijakan, dan berkomunikasi dengan pemilih.

- **Debat Publik:** Media memberikan platform untuk debat dan diskusi politik. Pertemuan debat, wawancara, dan forum diskusi di media membantu masyarakat memahami sudut pandang berbagai pemimpin politik.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Media berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui investigasi jurnalistik, media dapat mengungkap kasus-kasus korupsi atau tindakan yang tidak etis dari pihak-pihak politik.
- **Pendidikan Politik:** Media membantu dalam pendidikan politik dengan menyediakan informasi tentang proses politik, struktur pemerintahan, dan hak-hak warga negara.
- **Peran Sosial:** Media juga berfungsi sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Mereka dapat menjadi wadah bagi gerakan sosial atau kelompok advokasi.

Dengan demikian, media dan komunikasi politik bukan hanya sarana informasi, tetapi juga memegang peran penting dalam membentuk dinamika politik suatu negara dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

Tokoh Politik

Tokoh politik memainkan peran penting dalam membentuk, mempengaruhi, dan menjalankan infrastruktur politik suatu negara. Peran mereka melibatkan berbagai aktivitas dan tanggung jawab, dan dapat mencakup aspek kepemimpinan, pembuatan kebijakan, dan interaksi dengan masyarakat. Tokoh politik merupakan bagian dalam infrastruktur politik. Mereka memiliki peran utama dalam beberapa hal. Salah satunya yakni dalam kepemimpinan. Tokoh politik diwajibkan mengambil keputusan strategis. Tokoh politik, terutama mereka yang menempati posisi tinggi seperti presiden, perdana menteri, atau kepala negara, memiliki peran dalam mengambil

keputusan strategis untuk arah negara. Mereka membantu merumuskan visi dan misi negara, membimbing arah pembangunan dan perubahan politik.

Tokoh politik terlibat dalam merancang, mengusulkan, dan menetapkan kebijakan publik dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Mereka pun memiliki kewajiban dalam menentukan prioritas nasional dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam perannya di bidang internasional, para tokoh politik biasanya mewakili negara di tingkat Internasional. Tokoh politik mewakili negara dalam hubungan internasional bertujuan untuk melakukan diplomasi, dan membangun kerjasama dengan negara-negara lain. Hal tersebut berguna untuk membangun citra dan reputasi negara. Melalui peran mereka di arena internasional, tokoh politik berkontribusi dalam membangun citra dan reputasi negara di mata dunia.

Sebagai tokoh politik mereka seharusnya bisa melakukan Komunikasi Publik. Untuk bersentuhan dengan masyarakat dengan melakukan komunikasi publik salah satunya adalah yang paling sederhana yaitu menyampaikan sebuah visi dan misi. Tokoh politik memiliki peran dalam menyampaikan pesan dan visi mereka kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk pidato, konferensi pers, dan media sosial. Mereka berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh warga negara. Selain itu mereka melakukan Partisipasi Politik guna mengambil bagian dalam proses demokrasi. Tokoh politik terlibat dalam pemilihan umum, kampanye politik, dan proses demokrasi lainnya. Mereka juga bertanggung jawab kepada konstituennya dan diharapkan untuk mewakili kepentingan masyarakat.

Tokoh politik dapat memainkan peran dalam memastikan penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum negara. Salah satunya melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Pemerintah

harus dilakukan oleh tokoh politik. Tokoh politik yang tidak berada di pemerintahan mungkin memainkan peran pengawasan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Salah satu hal yang sangat penting yakni menyuarakan Kepentingan Masyarakat. Mereka dapat menjadi juru bicara bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Peran tokoh politik sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada tingkat pemerintahan dan posisi mereka. Dalam infrastruktur politik suatu negara, kontribusi dan tanggung jawab tokoh politik sangat berpengaruh terhadap arah dan keadaan politik negara tersebut.

D. Hubungan Internasional dalam Infrastruktur Politik di Indonesia

Dalam konteks infrastruktur politik di Indonesia, hubungan internasional memainkan peran yang penting. Hubungan internasional mencakup berbagai aspek, termasuk diplomasi, kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, dan kerjasama internasional. Berikut beberapa poin yang menjelaskan bagaimana hubungan internasional terkait dengan infrastruktur politik di Indonesia :

- **Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri**
 - **Peran Pemerintah:** Pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi sebagai alat untuk mempromosikan kepentingan nasional di tingkat internasional. Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain menjadi bagian integral dari infrastruktur politik.
 - **Kebijakan Luar Negeri:** Kebijakan luar negeri Indonesia mencakup aspek-aspek seperti perdamaian, keamanan, kerjasama ekonomi, dan hak asasi manusia. Pemilihan mitra kerja sama dan dukungan dari negara lain memengaruhi dinamika politik di dalam negeri.

- **Perdagangan Internasional**
Pengaruh Ekonomi: Hubungan internasional melalui perdagangan internasional dapat membentuk kebijakan ekonomi di dalam negeri. Perjanjian perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain dapat membantu atau menantang kebijakan ekonomi dalam negeri.
- **Kerjasama Internasional**
Isu Global: Infrastruktur politik di Indonesia mencakup partisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan lainnya. Kerjasama di tingkat internasional dalam menanggapi isu-isu global, seperti perubahan iklim, keamanan, dan kesehatan, dapat memengaruhi kebijakan dalam negeri.
- **Ketahanan Keamanan**
Kerjasama Regional: Indonesia terlibat dalam kerjasama regional untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Hubungan dengan negara-negara tetangga melibatkan koordinasi kebijakan untuk mengatasi masalah bersama seperti keamanan perbatasan, terorisme, dan kejahatan lintas negara.
- **Isu Lingkungan dan Keberlanjutan**
Pengaruh Global: Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi bagian penting dari agenda politik global. Kerjasama internasional dalam hal ini dapat memengaruhi kebijakan lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia.
- **Hak Asasi Manusia**
Kritik dan Kerjasama: Hubungan internasional juga mencakup sorotan terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia. Kritik dari pihak internasional atau kerjasama dalam bidang ini dapat membentuk respons dan perubahan kebijakan di tingkat nasional.

Penting untuk diingat bahwa hubungan internasional tidak hanya memengaruhi kebijakan politik, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk citra dan reputasi negara di mata dunia. Keseluruhan, hubungan internasional adalah bagian tak terpisahkan dari infrastruktur politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia.
- Arbi, Sanit. 2015. Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. Jurnal Ilmu Politik Vol.1
- Endang, Komara. 2015. Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. Edukasi jurnal, Sosiso Didakdita, 2015
- Fadli, Andi Muh. Dzul. (2017). Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Deepublish
- Harnawansyah, M. Fadhillah. (2019). Sistem Politik Indonesia, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Hartono, R. (2016). Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews. (1991). Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Muchtar Khoiruddin. 2016. Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 14. No. 2
- Risnawan, Wawan. 2017. Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik, dalam pembentukan kebijakan publik. Dinamika: Jurnal Ilmuan Ilmu Administrasi Negara
- S. Arbi. (1981), SISTEM POLITIK INDONESIA (Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan). Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sjamsuddin, Nazruddin, Toto Pribadi, dan Zulkifli Hamid. (1995). Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka
- Soelistiyati Ismail Gani, 1984, Pengantar Ilmu Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta .
- Sukarna. (1992). Sistem Politik Indonesia II. Bandung: Mandar Maju.



Bab 14

Fungsi Legislatif dan Eksekutif

Oleh Ivan Elisabeth Purba

A. Pendahuluan

Fungsi legislatif dan eksekutif dalam setiap sistem pemerintahan merupakan dua pilar utama yang membentuk landasan kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Kedua fungsi ini memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menjalankan kebijakan publik, serta mewujudkan tujuan-tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan.

Fungsi legislatif, yang seringkali dilaksanakan oleh badan legislatif atau parlemen, bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan mewakili

kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, fungsi eksekutif, yang biasanya diemban oleh kepala pemerintahan dan badan eksekutif, bertugas untuk menjalankan kebijakan publik yang telah disahkan oleh badan legislatif, mengelola administrasi negara, serta menegakkan hukum dan ketertiban.

Penyelenggaraan fungsi legislatif dan eksekutif seringkali mengalami dinamika kompleks, di mana terdapat interaksi, persaingan, dan ketergantungan antara kedua lembaga tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang peran, kewenangan, serta hubungan antara legislatif dan eksekutif sangatlah penting dalam konteks menjaga stabilitas politik, menciptakan kebijakan yang efektif, dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Pemahaman tentang fungsi legislatif dan eksekutif penting karena keduanya merupakan komponen utama dari sistem pemerintahan dalam berbagai negara.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemahaman tentang fungsi keduanya sangatlah penting:

- **Pembagian Kekuasaan:** Di banyak sistem pemerintahan demokratis, kekuasaan negara dibagi antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Memahami peran dan fungsi masing-masing cabang membantu masyarakat untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dan diatur.
- **Checks and Balances:** Konsep "checks and balances" adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokratis. Cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Memahami fungsi legislatif dan eksekutif membantu mengidentifikasi bagaimana mekanisme pengawasan dan keseimbangan tersebut beroperasi.
- **Proses Pembuatan Kebijakan:** Legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan kebijakan, sementara eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Memahami peran keduanya membantu

masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat, dijalankan, dan dievaluasi.

- **Partisipasi Demokratis:** Memahami fungsi legislatif dan eksekutif memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Dengan pemahaman yang baik, warga negara dapat memberikan masukan dan melibatkan diri dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
- **Akuntabilitas dan Transparansi:** Pemahaman yang baik tentang fungsi legislatif dan eksekutif memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dan mewujudkan akuntabilitas. Masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dan nilai-nilai demokratis.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang fungsi legislatif dan eksekutif merupakan aspek kunci dalam partisipasi politik yang efektif dan dalam memastikan bahwa pemerintahan beroperasi secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

B. Fungsi Legislatif

Fungsi legislasi adalah proses pembuatan, pengesahan, dan perubahan undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh badan legislatif, yang merupakan salah satu dari tiga cabang kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis.

Berikut adalah beberapa fungsi utama dari badan legislatif:

- **Pembuatan Undang-Undang:** Badan legislatif bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.
- **Pengawasan Pemerintah:** Legislatif mempunyai peran dalam mengawasi kegiatan eksekutif (pemerintah). Ini termasuk memeriksa program-program pemerintah, mengajukan pertanyaan kepada pejabat pemerintah, dan menyelidiki tuduhan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan.

- Menyediakan Dana Publik: Badan legislatif juga bertanggung jawab untuk menyetujui anggaran negara dan mengontrol pengeluarannya.
- Mengatur Hubungan Luar Negeri: Legislatif dapat memiliki peran dalam meratifikasi perjanjian internasional, menyusun kebijakan luar negeri, dan memeriksa kebijakan eksternal pemerintah.
- Mewakili Kepentingan Publik: Legislatif harus mewakili kepentingan masyarakat yang beragam dalam proses pembuatan kebijakan.

Sumber kekuasaan legislatif bervariasi tergantung pada struktur pemerintahan suatu negara. Namun, dalam banyak sistem pemerintahan demokratis, sumber kekuasaan legislatif meliputi:

- Konstitusi: Dokumen konstitusi negara menetapkan struktur dan kewenangan badan legislatif serta prosedur pembuatan undang-undang.
- Pemilihan Umum: Legislatif sering kali dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
- Kekuasaan Hukum: Badan legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang mengikat semua warga negara, dan hukum tersebut harus ditaati.
- Kontrol Publik: Legislatif dapat menerima masukan dan tekanan dari masyarakat umum, kelompok kepentingan, dan lembaga-lembaga lain dalam membuat keputusan.
- Separasi Kekuasaan: Prinsip pemisahan kekuasaan memungkinkan badan legislatif untuk menjalankan peran dan fungsi mereka secara independen dari cabang eksekutif dan yudikatif pemerintah. Legislatif memiliki peran yang krusial dalam sebuah negara demokratis.

Berikut adalah beberapa peran utama dari lembaga legislatif:

- Pembuatan Undang-Undang: Peran paling mendasar dari lembaga legislatif adalah pembuatan undang-undang. Anggota legislatif membuat, meninjau, memperdebatkan, dan

mengesahkan undang-undang yang membentuk kerangka hukum suatu negara.

- **Pengawasan Terhadap Pemerintah:** Legislatif bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan eksekutif. Hal ini termasuk memeriksa kebijakan, mengawasi pengeluaran anggaran, dan menjamin bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum serta kepentingan masyarakat.
- **Representasi Rakyat:** Legislatif berfungsi sebagai wakil rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Anggota legislatif memperjuangkan kepentingan konstituennya, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan menjadi perantara antara pemerintah dan rakyat.
- **Pembentukan Kebijakan Publik:** Melalui debat dan diskusi di dalam lembaga legislatif, kebijakan-kebijakan publik dirumuskan dan direvisi. Legislatif memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
- **Penganggaran dan Kontrol Keuangan:** Legislatif menyetujui anggaran negara dan mengawasi penggunaannya. Mereka memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
- **Pendidikan Politik:** Legislatif juga berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui proses-proses legislasi yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat memahami lebih baik tentang proses politik, hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemerintahan demokratis.
- **Menciptakan Keseimbangan Kekuasaan:** Legislatif berkontribusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Mereka memberikan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Peran-peran tersebut menjadikan lembaga legislatif sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan demokratis yang efektif dan berkelanjutan.

C. Fungsi Eksekutif

Fungsi eksekutif merujuk pada kumpulan proses kognitif yang terlibat dalam pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan pengaturan perilaku yang kompleks. Fungsi eksekutif memungkinkan seseorang untuk mengatur pikiran dan tindakan mereka sesuai dengan tujuan dan lingkungan yang berubah.

Fungsi eksekutif adalah seperangkat proses kognitif yang mengatur, mengelola, dan mengarahkan perilaku, pemikiran, serta emosi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Eksekutif merupakan salah satu cabang pemerintahan dalam sistem demokratis yang memiliki fungsi-fungsi utama dalam menjalankan kebijakan negara dan mengelola pemerintahan secara efektif.

Berikut adalah beberapa fungsi eksekutif:

- **Pelaksanaan Kebijakan:** Fungsi utama dari cabang eksekutif adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui oleh lembaga legislatif. Ini termasuk mengimplementasikan undang-undang, program-program pemerintah, dan keputusan-keputusan administratif.
- **Kepemimpinan Pemerintahan:** Pemimpin eksekutif, seperti presiden, perdana menteri, atau kepala negara lainnya, memimpin pemerintahan dalam menetapkan agenda, mengoordinasikan kebijakan, dan mengambil keputusan strategis untuk negara.
- **Penyusunan Anggaran:** Cabang eksekutif memiliki peran dalam penyusunan anggaran negara. Mereka menyusun rencana anggaran dan mengajukannya kepada lembaga legislatif untuk disetujui, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran tersebut.
- **Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri:** Eksekutif bertanggung jawab atas hubungan luar negeri dan kebijakan luar negeri negara.

Mereka menjalankan diplomasi, menegosiasikan perjanjian internasional, dan mewakili negara di forum-forum internasional.

- **Pengawasan Administrasi Publik:** Cabang eksekutif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola administrasi publik. Mereka memastikan bahwa birokrasi pemerintahan berfungsi efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
- **Keamanan dan Pertahanan:** Eksekutif bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara. Mereka menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayahnya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar, serta memastikan keamanan warga negara dan keamanan nasional secara umum.
- **Penegakan Hukum dan Keadilan:** Cabang eksekutif memiliki peran dalam penegakan hukum dan keadilan. Mereka menjalankan kebijakan penegakan hukum, menegakkan pelanggaran hukum, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Fungsi-fungsi ini memberikan fondasi bagi cabang eksekutif untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam mengelola negara dan mewujudkan tujuan-tujuan pemerintahan sesuai dengan kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi.

D. Dinamika Fungsi Legislatif dan Eksekutif

Dinamika antara fungsi legislatif dan eksekutif merupakan inti dari sistem pemerintahan demokratis di banyak negara di seluruh dunia. Keduanya memainkan peran yang berbeda namun saling terkait dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Dinamika antara fungsi legislatif dan eksekutif dapat juga dilihat dari fungsi masing-masing.

Fungsi Legislatif sebagai pembuat undang-undang adalah membuat atau memodifikasi undang-undang yang sudah ada. Proses ini melibatkan penyusunan, pembahasan, dan pengesahan rancangan undang-undang. Legislatif juga berperan dalam mengawasi kegiatan

eksekutif, termasuk penggunaan keuangan publik, kebijakan pemerintah, dan tindakan eksekutif lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui pertanyaan, penyelidikan, dan mekanisme lainnya. Selain itu juga legislatif merupakan forum di mana wakil rakyat dipilih untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Mereka bertindak sebagai suara publik dan bertanggung jawab atas mewujudkan kepentingan konstituen mereka.

Fungsi eksekutif adalah menjalankan kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh legislatif. Ini meliputi pelaksanaan undang-undang, pengelolaan keuangan negara, dan administrasi publik secara umum. Meskipun legislatur membuat undang-undang, cabang eksekutif memiliki peran dalam merumuskan kebijakan publik. Hal ini meliputi penyusunan anggaran, inisiatif kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis. Kepala eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri, biasanya dianggap sebagai pemimpin nasional yang bertanggung jawab atas arah dan keberhasilan pemerintahan secara keseluruhan.

Dinamika antara kedua fungsi tersebut dapat dilihat melalui proses :

- **Check and Balance:**
Dalam sistem demokratis yang sehat, fungsi legislatif dan eksekutif saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip check and balance memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut.
- **Kolaborasi dan Konflik:**
Terkadang, ada kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mencapai tujuan bersama. Namun, juga sering terjadi konflik antara keduanya, terutama ketika ada perbedaan dalam pandangan politik atau kepentingan.
- **Negosiasi Kebijakan:**
Proses legislasi sering melibatkan negosiasi antara kedua cabang pemerintahan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima

oleh semua pihak. Ini bisa melibatkan kompromi dan perubahan dalam rancangan undang-undang.

Dinamika antara fungsi legislatif dan eksekutif dapat sangat bervariasi tergantung pada struktur pemerintahan dan konteks politik dari suatu negara.

E. Dampak Fungsi Legislatif dan Eksekutif Terhadap Kebijakan dan Pengelolaan Negara

Fungsi legislatif dan eksekutif memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kedua fungsi tersebut:

- **Pembuatan Kebijakan:**

Fungsi legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Badan legislatif memainkan peran penting dalam merumuskan, merevisi, dan menyetujui undang-undang yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Legislatif juga dapat memperkenalkan inisiatif legislatif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara.

Fungsi eksekutif melibatkan pelaksanaan kebijakan publik yang telah disahkan oleh badan legislatif. Eksekutif, yang dipimpin oleh kepala pemerintahan, memiliki peran penting dalam menerapkan undang-undang, mengelola administrasi negara, dan mengeksekusi kebijakan yang telah ditetapkan.

- **Dinamika Kebijakan:**

Interaksi antara fungsi legislatif dan eksekutif mempengaruhi dinamika pembuatan kebijakan. Kedua lembaga ini dapat saling mempengaruhi melalui proses legislasi, negosiasi, dan kompromi. Terdapat situasi di mana legislatif dan eksekutif memiliki kepentingan yang berbeda, dan hal ini dapat menghasilkan konflik atau kolaborasi dalam pembuatan kebijakan.

Negosiasi antara legislatif dan eksekutif sering kali diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang memadai dalam pembentukan kebijakan. Keterlibatan kedua lembaga ini juga memastikan

bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keragaman kepentingan masyarakat serta memperhitungkan berbagai perspektif.

- Akuntabilitas dan Transparansi:
Fungsi legislatif dan eksekutif juga penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan negara. Badan legislatif memiliki peran pengawasan terhadap kinerja eksekutif, termasuk penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, interaksi antara kedua lembaga ini membantu menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Heywood, *Politics*, New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Baddeley, A., 2012. Working memory: theories, models, and controversies. *Annual Review of Psychology*, 63, 1-29.
- Berger, B., 2009. Political Theory, Political science and the end of civic engagement. *Perspective on politics*, 7(2). 335-350
- Diamond, A., 2013. Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.
- Heywood, Andrew. *Politics*. Palgrave Macmillan, 2013.
- Jones, George W., and John P. Williamson. *The Dynamics of American Democracy: Partisan Polarization, Political Competition, and Government Performance*. Westview Press, 2016.
- Joseph, William A.; Krieger, Joel; Kesselman, Mark., 2009. *Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas*. Cengage Learning. ISBN 978-0-547-21629-4.
- Michel G. Roskin, et.al., 2000, *Political Science An Introduction*, Prentice Hall New Jersey

- Miyake, A., & Friedman, N. P., 2012. The nature and organization of individual differences in executive functions: Four general conclusions. *Current Directions in Psychological Science*, 21(1), 8-14.
- Rosenbloom, David H., et al. 2018., *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education, .
- Norton, Philip. 2015. *The Constitution in Flux*. Yale University Press.
- Smith, Steven S., et al. 2014. *The Oxford Handbook of Legislative Studies*. Oxford University Press, 2014.



Bab 15

Perkembangan Partai Politik Di Indonesia

Oleh Hasruddin Nur

A. Partai Politik

Menurut pendapat Max Weber (Maran, 2001 : 22) mengutarakan pengertian daripada politik sebagai berikut : “Politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara negara maupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara. Manusia adalah “political animal”, menurut Aristoteles lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Di dalam setiap masyarakat, kekurangan sumber daya yang bernilai memaksa orang untuk bermain politik, untuk menentukan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana (Lasswell, 1936). Politik adalah salah satu tipe

interaksi manusia yang melibatkan suatu partai politik yang memperoleh dan menjalankan kekuasaan atas yang lainnya. Jika diserahkan kepada individu-individu sendiri, politik dapat menjadi suatu permainan yang buruk, dengan pemainpemain yang mencoba saling mencekik untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing.

Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilu tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum. Makna daripada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan kehidupan disegala bidang. Dengan demikian maka perubahan arah kebijakan bangsa dan negara tersebut, tidak terlepas daripada peranan partaipartai politik yang mengisi pesta demokrasi rakyat tersebut dengan sejumlah visi dan misi partai yang bervariasi sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Seiring dengan konsep demokrasi, maka parlemen menjadi badan yang memiliki hak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan kebijakan umum. Dan menyajikannya dalam bentuk konstitusi, yang pada awalnya hanya mempunyai kontribusi hak privilege atau jaminan hidup sehingga pada gilirannya dapat membatasi manggerakan Raja dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan demikian partai politik, sangat memegang peranan penting di dalam parlemen atau lembaga legislatif yang nantinya secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan tujuan suatu negara. Setiap partai politik akan membawa visi dan misi serta idealisme mereka dalam menarik simpati rakyat, dengan demikian diharapkan akan mendapat dukungan yang banyak dari rakyat. Dengan demikian akan dengan lancar memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat dalam rangka peranannya dalam sebuah negara demokrasi, yang akan memberikan

perubahan sosial dan pandangan politik rakyat dengan keberadaan partai politik. (Muh. Jafar AW, 2017)

B. Karakter Partai Politik di Indonesia

Partai politik juga memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakannya dari organisasi lain. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

- Memiliki tujuan politik Bersama
Partai politik memiliki tujuan politik bersama yang menjadi landasan ideologis dan program politik mereka. Tujuan politi ini dapat berupa visi politik, gagasan-gagasan politik, serta tuntutan-tuntutan politik tertentu.
- Berbasis dukungan Masyarakat
Partai politik memperoleh dukungan masyarakat untuk memperjuangkan tujuan politik mereka. Dukungan masyarakat ini dapat berupa dukungan secara langsung seperti dalam pemilihan umum, maupun dukungan secara tidak langsung melalui partisipasi dalam kegiatan partai.
- Beranggotakan orang-orang dengan kepentingan politik serupa
Partai politik terdiri dari orang-orang dengan kepentingan politik serupa dan memiliki pandangan politik yang relatif sama. Kepentingan politik ini dapat berasal dari kelompok sosial, agama, ideologi politik, atau kepentingan ekonomi.
- Terorganisir secara hierarkis
Partai politik memiliki struktur organisasi yang terorganisir secara hierarkis, dimana kekuasaan dan tanggung jawab terbagi di antara para anggota partai. Struktur organisasi ini dapat berupa kepengurusan partai, fraksi, atau cabang partai di wilayah tertentu.
- Mengikuti aturan hukum dan demokrasi
Partai politik mengikuti aturan hukum dan demokrasi yang berlaku dalam sistem politik negara. Partai politik harus tunduk pada undang-undang dan regulasi negara serta harus mematuhi nilai-nilai demokrasi seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik.

Dalam menjalankan fungsinya, partai politik dapat mengambil beberapa strategi dan taktik politik. Beberapa strategi dan taktik politik yang umum digunakan oleh partai politik antara lain kampanye politik, lobbying, koalisi politik, dan gerakan sosial politik. (Hasruddin Nur, 2023)

Secara khusus partai politik memiliki karakteristik sebagai:

- Ideologi: Partai politik biasanya didasarkan pada ideologi tertentu seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, atau nasionalisme.
- Tujuan dan Visi: Partai politik memiliki tujuan dan visi tertentu untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mencapai tujuan politik yang diinginkan.
- Organisasi: Partai politik terdiri dari struktur organisasi yang terorganisir, seperti anggota partai, dewan pengurus, dan pimpinan partai.
- Anggota dan Dukungan: Partai politik memiliki anggota yang mewakili kepentingan masyarakat, dan juga mendapat dukungan dari kelompok tertentu.
- Manifesto: Partai politik memiliki manifesto yang merangkum tujuan dan visi partai serta rencana aksi untuk mencapainya.
- Pemimpin: Partai politik dipimpin oleh seseorang atau kelompok yang memimpin partai dan bertanggung jawab atas keputusan dan arah partai.
- Kompetisi: Partai politik bersaing satu sama lain untuk memenangkan dukungan dan mendapatkan posisi di pemerintahan.
- Representasi: Partai politik bertujuan untuk mewakili kepentingan masyarakat dan menjadi suara bagi warga negara di dalam sistem politik.
- Akuntabilitas: Partai politik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh para anggota dan pemimpin partai.

- Partisipasi: Partai politik memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan mempengaruhi kebijakan publik. (Hasruddin Nur, 2023)

C. Peran dan Fungsi dari Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi proses politik dan memperjuangkan kepentingan politik masyarakat melalui proses demokrasi. Peranan dan fungsi partai politik dalam sistem politik adalah sebagai berikut:

- Mewakili kepentingan politik masyarakat: Partai politik memperjuangkan kepentingan politik masyarakat melalui jalur politik yang demokratis. Partai politik merupakan alat yang dipilih oleh masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.
- Menyediakan alternatif pemimpin dan program politik: Partai politik menyediakan pilihan alternatif pemimpin dan program politik yang berbeda untuk dipilih oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.
- Menjalin hubungan dengan masyarakat: Partai politik dapat menjalin hubungan dengan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka. Partai politik dapat melakukan kampanye, melakukan sosialisasi politik, dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan dukungan politik.
- Mengawasi kebijakan pemerintah: Partai politik memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Partai politik dapat mengevaluasi kebijakan pemerintah dan memberikan umpan balik kepada pemerintah.
- Membantu menjaga stabilitas politik: Partai politik dapat membantu menjaga stabilitas politik dan demokrasi dengan memperjuangkan kepentingan politik masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Partai politik dapat memastikan bahwa

masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan partisipasi politik yang layak.

- Membangun sistem politik yang sehat: Partai politik dapat membantu membangun sistem politik yang sehat dan transparan melalui proses politik yang demokratis. Partai politik dapat menumbuhkan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
- Menyampaikan aspirasi politik: Parpol juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi politik masyarakat kepada pemerintah. Partai politik dapat membawa aspirasi politik tersebut dalam forum politik dan berusaha memperjuangkan kepentingan tersebut melalui proses politik yang demokratis.
- Menjalinkan kerja sama dengan partai politik lain: Partai politik juga berfungsi dalam menjalin kerja sama dengan parpol lainnya untuk memperjuangkan kepentingan politik publik. Melalui kerja sama ini, partai politik dapat memperkuat dukungan politik dan memperjuangkan kepentingan politik bersama-sama.
- Meningkatkan partisipasi politik: Partai politik dapat memperkuat partisipasi politik masyarakat dengan memberikan wadah untuk berpartisipasi dalam proses politik. Partai politik dapat memberikan akses terhadap informasi politik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses politik yang demokratis.
- Membantu menjaga demokrasi: Partai politik juga berfungsi untuk membantu menjaga demokrasi dan menghindari pengambilan keputusan politik yang otoriter. Partai politik dapat memastikan bahwa proses politik berjalan dengan transparan dan akuntabel serta menghindari adanya upaya-upaya pengambilan keputusan yang otoriter.

Secara keseluruhan, partai politik memainkan peran penting dalam sistem politik karena dapat memperjuangkan kepentingan politik masyarakat, menyediakan alternatif pemimpin dan program politik, menjalin hubungan dengan masyarakat, mengawasi kebijakan pemerintah, membantu menjaga stabilitas politik, membangun sistem politik yang sehat, menyampaikan aspirasi

politik, menjalin kerja sama dengan partai politik lain, meningkatkan partisipasi politik, dan membantu menjaga demokrasi. (Hasruddin Nur, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

Hasruddin Nur. 2023. *POLITIK LOKAL DAN GERAKAN SOSIAL*

Potret Kemenangan Kotak Kosong. Kendari: CV. Literasi Indonesia

Lasswell, Harold. 1950. *A Study of Power*. Illinois : The Free Press.

Maran, Raga Rafael. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Muhammad Jafar Aw. 2017. Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, <https://stisipbantenraya.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Peranan-Partai-Politik-Dalam-Demokrasi-Di-Indonesia.pdf>

PROFIL PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane Binti La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma Binti La Timbasa (wanga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar.

Penulis menekuni bidang ilmu Pemerintahan, Administrasi, Politik, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya.

Saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Al-Islam Kemuhammadiyaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Periode 2017 – 2021 dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Periode 2017 – 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: [putrohade@gmail.com/](mailto:putrohade@gmail.com)
adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301



Yoga Mahendra, M.Pd.

Dosen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bina Bangsa

Penulis lahir di Kuningan tanggal 14 Juli 1996. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bina Bangsa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Yogyakarta pada Tahun 2019 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pendidikan IPS di Universitas Negeri Yogyakarta lulus pada Tahun 2021. Penulis menekuni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang sosial budaya.



Muhammad Yusuf AR., S.Ag., M.I.Kom

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar, Makassar

Lahir di Bantaeng, 05 Februari 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar (Unifa), Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam IAIN Alauddin, 1995. Melanjutkan S2 pada Jurusan Media dan Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Jakarta selesai pada 2012. Saat ini tengah mengikuti Program Doktorat Jurusan Dirasah Islamiah dengan konsentrasi Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Makassar.

Penulis selain aktif mengampu mata kuliah Manajemen Media Elektronik dan Komunikasi Politik di Unifa, juga sebagai praktisi penyiaran sebagai Host dan Produser Eksekutif beberapa program acara televisi, antara lain: “INSIDE” (Setiap Orang adalah Inspirasi), “Meja Redaksi”, ”D’Warkop” (Diskusi Warung Kopi), dan “Bicara Politik” (Karena Kekuasaan untuk Rakyat). Sebagai jurnalis, Penulis adalah pemegang sertifikat Wartawan Utama Dewan Pers sejak 2012 dan menjadi tim Penguji Kompetensi Jurnalis sejak 2013, yang bernaung di bawah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
(^^)



Hj. Siti Inayatul Faizah, S. Ag., M. Si., M. E. I.

Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Airlangga

Penulis bernama **Siti Inayatul Faizah** yang sekarang bertempat tinggal di Surabaya. Beliau juga seorang dosen di Universitas Airlangga yang sekarang sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Selain mengajar, beliau juga aktif berorganisasi baik di internal maupun eksternal kampus serta aktif di kepenulisan buku.



Andi Yusuf Katili, S.Sos., M.Si.

Dosen Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial
Universitas Bina Taruna Gorontalo

Penulis lahir di Rumah Sakit Stela Maris, Makassar (SulSel) 28 Januari 1956. Pendidikan TK di Sungguminasa, Makassar Tahun 1962. SD Cokroaminoto Manado Tahun 1969. SMP Negeri Manado Tahun 1973. STM Saraswati Denpasar Tahun 1974. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Tahun 1977. Program S1 FT Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1980. Program S1 FISIP UT Tahun 2006 Prodi Ilmu Komunikasi. Program Magister S2 STIA Bina Taruna Tahun 2015 Ilmu Administrasi. Pengalaman kerja sebagai wartawan freelance di Jakarta Tahun 1984 hingga 2004. Tutor Universitas Terbuka Tahun 2007 sd 2023. Dosen tetap non struktural di STIA Bina Taruna Gorontalo Tahun 2008 sd 2016. Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Gorontalo Tahun 2010 sd 2014. Penerima Sertifikasi Dosen (serdos). Dosen tetap struktural STIA Bina Taruna sebagai Ketua P3M sekaligus pengelola jurnal Tahun 2017 sd 2021. Kepala LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Tahun 2021-2025. Penulis mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Teori Politik, Geografi Politik, Perencanaan Pembangunan, Administrasi Perpajakan, Etika Administrasi Negara, Teori Organisasi, Perilaku Organisasi, Kepemimpinan, Perbandingan Administrasi Publik. Penulis juga pengelola 7 jurnal sebagai Editor in Chief pada

<https://e-journal.unbita.ac.id>. Juga sebagai Editor jurnal Internasional yang dapat dikunjungi pada link: <http://e-journal.goadri.or.id/>. Selain itu aktif melakukan riset secara mandiri dan kolaborasi dibiayai STIA Bina Taruna Gorontalo. Penulis memiliki beberapa artikel penelitian, prosiding dan pengabdian diterbitkan di berbagai jurnal, baik Nasional maupun Internasional. Juga memiliki 4 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Juga pernah mendapat dana hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti (DRTPM). Penulis memiliki Sinta-ID 6645114. Penulis adalah Pengurus Relawan Jurnal Indonesia (RJI) DPD Gorontalo dan Pengurus Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) DPD Gorontalo. Pengurus APTISI Gorontalo, Pengurus Pemuda Panca Marga (PPM) dan FKPPi.



Muhamad Abas, S.H., M.H.
Dosen Ilmu Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Dosen Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mata Kuliah yang diampu yaitu Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Dagang Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Penanaman Modal, Hukum Persaingan Usaha Dan Antimonopoli, dan Hukum Perusahaan serta Hukum Kepailitan dan PKPU. Penulis kelahiran Cirebon 22 April 1980. Menamatkan pendidikan SH & MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas yang sama. Sebagai dosen dengan JAD Lektor mempunyai Sinta ID: 6676585, Google Scholar: RLZKITcAAAAJ, Garuda ID: 1735325. Selanjutnya untuk korespondensi dapat melalui emailmuhamad.abas@ubpkarawang.ac.id / abbas2107022@gmail.com dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen/akademisi penulis juga aktif sebagai praktisi yaitu Advokat PERADI, Asesor BNSP, Pengelola jurnal dan Editor/Reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

Motto: *“Bismillah semangat melakukan yang terbaik dan alhamdulillah hasilnya dapat bermanfaat untuk orang lain”.*



Hasanudin Kasim, S.Pd., M.Pd

Dosen Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Megarezky Makassar

Penulis lahir di Toang, tanggal 16 Juli 1994. Anak ke-empat dari empat bersaudara, dari pasangan Muhammad Kasim dan Sopiah Aku. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Megarezky Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Sosiologi dan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada tahun 2018 dan melanjutkan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar program studi IPS dengan kekhususan Pendidikan Sosiologi dan memperoleh gelar sarjana strata dua (S2) pada tahun 2021.

Penulis mengajar beberapa mata kuliah seperti: Manajemen Pendidikan, Pendidikan Pancasila, Sosiologi Lingkungan dan Kriminal, Pembelajaran Berbasis Digital, Inovasi Pembelajaran Sosiologi, Sosiologi Komunitas Khusus. Penulis juga menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).



Yusuf Budi Prasetya Santosa, M.Pd.

Dosen Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Universitas Indraprasta PGRI

Penulis lahir di Serang tanggal 24 Juli 1991. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (2009-2014) dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (2015-2018). Penulis menekuni bidang penelitian pendidikan sejarah dan kesejarahan, serta penulis aktif dalam mempublikasikan hasil penelitiannya melalui berbagai jurnal penelitian dan menerbitkan buku. Beberapa publikasi terbaru yang penulis hasilkan, antara lain:

- History of The Development of Indonesian Food From The 10th Century To The Occasion of Japan yang diterbitkan di Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Volume 9, Nomor 1 (2023).
- Letjen Soeharto dalam Transisi Politik Indonesia Dari Akhir Orde Lama Hingga Terbentuknya Orde Baru (1965-1967) (Pustaka Indis, 2023).

- Peran Guru dalam Dunia Pendidikan (Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).
- Mengenal Lebih Dekat Universitas Indraprasta PGRI; Perjalanan dan Perjuangan 2004-2023 (Erlangga, 2023).
- Dasar Metode Penelitian (Mafy Media Literasi Indonesia, 2024).



Dinar Alqadri, S.H., M.H.

Dosen Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Megarezky

Penulis lahir di Bontobulaeng tanggal 28 Februari 1994. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Indah Wahyu Maesarini, S.IP., M.Si
Dosen Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami

Penulis lahir di Surabaya. Aktif sebagai dosen pada Ilmu Administrasi Publik Program Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana dengan Peminatan Manajemen Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penulis telah menghasilkan Book Chapter berjudul: Manajemen Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Teori Administrasi, Pengantar Ilmu Administrasi Publik dan Sistem Politik Indonesia



Vina Karina Putri, M.Pd.

Dosen Pendidikan IPS

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bina Bangsa

Penulis lahir di Kota Bandung tanggal 29 Agustus 1988. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bina Bangsa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung pada tahun 2010 dan melanjutkan S2 pada Universitas Indraprasta PGRI Kota Jakarta lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis terdaftar sebagai dosen aktif di Universitas Bina Bangsa sekaligus menjabat sebagai Kepala Prodi Pendidikan IPS. Kesibukannya selain mengajar, beliau aktif dalam membuat karya dalam bentuk tulisan yang diaplikasikan dalam sebuah buku maupun artikel. Pernah aktif sebagai Guru di SMP/SMK Al Ghifari Kota Bandung, Guru di SMKN 5 Kota Serang, Guru di MAN 1 Kota Serang. Selain menjadi seorang pendidik, penulis pernah bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal yakni Helmy Yahya Broadcasting Academy Kota Bandung pada tahun 2009-2010.

Penulis menekuni bidang Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. Kecintaannya dalam bidang pendidikan melahirkan inisiasi solutif dengan mendirikan Bimbingan Belajar “Rumah Belajar Juara” bagi siswa siswi SD, SMP dan SMA yang menginginkan intens belajar di luar jam sekolah. Dalam

kesibukannya mengabdikan sebagai dosen, penulis aktif sebagai relawan dalam beberapa kegiatan sosial bersama beberapa organisasi dan lembaga sosial yang berada di wilayah Banten dan Jabodetabek.



Fatkhuri, S.IP., MA., M.PP

Dosen Program Studi Ilmu Politik, FISIP UPN Veteran Jakarta

Penulis lahir di Pemalang Jawa Tengah, 15 Mei 1979. Beliau merupakan Dosen Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Beliau menyelesaikan Studi terakhirnya di Crawford School, Policy and Governance dalam bidang Public Policy di the Australian National University (ANU) Canberra, Australia beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada tahun 2006, dengan beasiswa Canadian International Development Agency (CIDA), beliau mendapat kesempatan mengikuti Summer Course di McGill University Montreal, Canada. Fatkhuri mengampu Mata Kuliah di antaranya Pengantar Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, E-Government, Birokrasi dan Politik, dan Politik dan Pemerintahan. Beliau cukup produktif menulis artikel ilmiah baik untuk jurnal, buku, maupun artikel untuk media massa. Beberapa buku yang pernah diterbitkan adalah buku berjudul: Birokrasi Publik dalam book chapter, Manajemen Sektor Publik (2023), Pendidikan Entrepreneurship: Mendorong Inovasi dan Kreatifitas Kewirausahaan Generasi Muda Indonesia, Penerbit KBM Indonesia (2023); Reformasi Pendidikan: Akreditasi, Pendataan dan Alternatif Kebijakan Pendidikan Nasional, Penerbit KBM Indonesia (2022); Kolom Politik Indonesia: Menyibak Tabir Demokrasi Pasca-Reformasi di Indonesia, Penerbit Tidar Media (2020); bersama para kolega terlibat dalam penulisan buku: Potret

politik Indonesia kontemporer: dari budaya politik hingga dinamika pilkada yang diterbitkan Intrans-Publishing (2018); Teori Sosiologi Suatu Pengantar, diterbitkan Ghalia Indonesia (2016); dan buku dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Karakter bangsa, Penerbit Hartomo Media Pustaka (2012). Fatkhuri saat ini menjadi Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DKI (2023-2026). Beliau dapat dihubungi melalui fatkhuri@upnvj.ac.id



OPAN AHMAD SOLIHIN, M.Pd

Guru MTsN 1 Kota Serang

Penulis lahir di Kota Serang pada tanggal 31 Oktober 1986. Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang bernama Opan Ahmad Solihin, S.Pd dengan NIP. 198610312011011011 dan bertugas pada MTsN 1 Kota Serang Provinsi Banten dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk.I /IIIC. Penulis lahir di Kota Serang pada 31 Oktober 1986 di hari Jum'at. Penulis memulai pendidikan di SDN Panacangan 1, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cipocok Jaya (SMPN 7 Kota Serang), lalu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Cipocok Jaya (SMAN 2 Kota Serang) dan setelah lulus melanjutkan kuliah S1 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan lulus di tahun 2009 dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 jurusan IPS di Unindra Jakarta. Setelah lulus S1 langsung bekerja di SMKS Putra Bangsa Kabupaten Serang kemudian dilanjut di SMKN 5 Kota Serang dan tak lama setelah itu penulis diterima menjadi PNS tahun 2011 dan di tempatkan di MAN Cibaliung sekarang menjadi MAN 4 Pandeglang hingga pertengahan tahun 2016 dan ditahun yang sama penulis pindah tugas di MTsN 1 Kota Serang di bawah naungan Kementerian Agama. Selain aktif di sekolah, penulis juga aktif sebagai dosen luar biasa di STKIP Banten dengan mengampu berbagai mata kuliah pada jurusan PKn. Selain menjadi guru PKn, penulis juga pernah mengajar Geografi yang Alhamdulillah selalu

mengharumkan nama MAN 4 Pandeglang berkat prestasi yang ditorehkan oleh siswa/inya dalam menjuarai KSM pelajaran Geografi baik di tingkat kabupaten maupun propinsi. Penulis juga memiliki blog pendidikan dengan nama blog www.kangopancivichukum.com. Karena kegemaran penulis dalam membuat sebuah tulisan, maka tak jarang penulis dimintai pendapatnya oleh wartawan lokal, wartawan sekolah dan kontributor Kanwil Kemenag Banten.



Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes

Dosen Kepemimpinan

Direktorat Pascasarjana Universitas Sari Mutiara Indonesia

Beliau menyelesaikan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Sumatera Utara. Saat ini beliau menjabat Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Pengalaman beliau sebagai Keynote Speaker pada Konferensi Internasional di Mahidol University Thailand tahun 2018, Keynote Speaker pada Konferensi PBRI di Thailand tahun 2018, Keynote Speaker pada Konferensi Webinar Internasional tahun 2020, dan Keynote Speaker pada 6th International Conference on Healthcare and Allied Sciences tahun 2023 di Kuala Lumpur. Saat ini beliau adalah Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Pusat. Beliau banyak mengikuti seminar, konferensi, pelatihan, kongres, forum, dan studi banding baik di dalam maupun luar negeri.



Hasruddin Nur

Lahir di Enrekang Kabupaten Enrekang pada tanggal 23 Maret 1991. Anak Pertama dari dua saudara yakni: Adinda Nurhidayanti buah hati dari pasangan Mahluddin dan Hasnah S.Pd. Telah berkeluarga dan memiliki istri yang bernama Hikmayanti, S.Pd., M.Pd. Memiliki Buah cinta yang Bernama Hanania Shakira Hasruddin.

Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak pada tahun 1995 dan tamat tahun 1997. Selanjutnya ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 45 Talaga Kabupaten Enrekang pada tahun 1997 dan tamat pada tahun 2003. Selanjutnya masuk ke SLTPN 1 Enrekang pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun 2006 masuk ke SMA Muhammadiyah Enrekang dan tamat tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) dan mengambil jurusan Pendidikan Sosiologi dan bergabung menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi, pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) program Strata Satu (SI) dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 melanjutkan studi ke jenjang S2 di Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Sosiologi dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan S3 di Universitas Negeri Makassar pada jurusan Ilmu Sosiologi dan menyelesaikan studi di tahun 2022. Sejak Tahun 2017, Penulis

menjadi dosen di Universitas Sawerigading Makassar sampai sekarang dan aktif melakukan kegiatan tridarma Pendidikan yaitu penelitian, pengabdian serta melakukan publikasi. Selain itu pula, penulis aktif menjalin Kerjasama dengan beberapa dosen dari perguruan tinggi lain dalam melakukan publikasi dan aktif dalam beberapa organisasi Seperti Menjadi Ketua Biro Pendidikan dan Pelatihan Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan Sampai Saat ini, Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2027, Pengurus HMPI Sulawesi Selatan (Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia), Pengurus Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia Bidang Jurnal, Publikasi & Dokumentasi (APPERTI). Adapun publikasi yang telah dilakukan oleh penulis seperti melakukan penulisan Buku dengan judul **POLITIK LOKAL DAN GERAKAN SOSIAL: Potret Kemenangan Kotak Kosong (I), PREVENTIF KEKERASAN SEKSUAL Di Perguruan Tinggi (II), Sosiologi Perkotaan Kapitalisasi Ruang dan Marginalisasi Sosial (III).**

Selanjutnya penulis juga telah melakukan publikasi jurnal Internasional dengan judul **Social Movement Of Regional Head Election In Makassar City In 2018 (1), Analysis of Completeness Products and Prices on the Decision of Buying ATK (Office Stationery) at UD. Pemancar Ilmu Store in Namlea City (2), The Birth of A Single Candidate at The Election Makassar City in 2018 (3), Coastal-Based Community Empowerment Strategy Ecotourism in Alor District (4), The Defeat of the Single Candidate in Makassar City Election 2018 (5).** Selain itu pula penulis melakukan berbagai publikasi jurnal Nasional dengan judul **Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Makassar (1), Relasi Kuasa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jelang Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Maros (2), PEREMPUAN DAN POLITIK (Analisis Partisipasi Calon Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Enrekang Pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019) (3), Peningkatan Perolehan Kursi Partai Nasdem Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Maros (4), Peran Elite Adat Pada**

Pilkada Kabupaten Pinrang 2018 (5), Relasi Politik di Kabupaten Maros (Studi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan) (6), Pola Asuh Dalam Keluarga Polri di Asrama Polisi Toddopuli Kota Makassar (7), Anak Jalanan Di Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin (Studi Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Eksploitasi Anak) (8), Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor terhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (9), Interaksi Antara Sesama Warga Binaan Di Rutan Kelas II B Enrekang Kabupaten Enrekang (10) dan masih ada beberapa terbitan jurnal maupun prosiding Nasional dan Internasional.

Dalam keseharian di kampus, penulis mengampu mata kuliah: Sosiologi Politik, Psikologi Sosial & Politik, Sosiologi Organisasi, Sosiologi Korupsi serta Sosiologi Kesehatan Masyarakat.